



Dampak Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Bangga Kecamatan Paguyaman Pantai

The Impact of the Family Hope Program in Poverty Alleviation in Bangga Village, Paguyaman Pantai District

Sainudin Latare¹⁾, Rudy Harold¹⁾, Sahrain Bumulo¹⁾ Ahmad Ali^{1*)}

¹⁾Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

^{*)}Corresponding Author: ahmadalisosiologi@gmail.com

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a social assistance program that is provided to help poor families in rural areas. According to the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, it is explained that "to improve the quality of life of poor and vulnerable families through increasing accessibility to health, education and social welfare services. This research aims to analyze the impact of the PKH program in alleviating poverty in rural communities. Research using qualitative methods with a descriptive approach. The results showed that the PKH program had a major impact on poor families in Bangga Village, where many PKH beneficiary communities benefited from the program. Even though the assistance funds received by the community are not large, the existence of the PKH program has lightened the burden on the community in meeting their daily needs, including the basic needs of poor households, the need to get education services, health services, and other needs of poor households.

Keyword: PKH Program, Poverty, Welfare

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang diberikan untuk membantu keluarga miskin di wilayah pedesaan. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, dijelaskan bahwa “untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program PKH dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat pedesaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKH telah memberikan berdampak besar bagi keluarga miskin di Desa Bangga, dimana banyak masyarakat penerima PKH merasakan manfaat dari adanya program tersebut. Meski dana bantuan yang diterima masyarakat tidak besar, namun dengan adanya bantuan program PKH ini telah meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, diantaranya kebutuhan pokok rumah tangga miskin, kebutuhan mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga miskin lainnya.

Kata kunci: Program PKH, Kemiskinan, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang signifikan dan serius. Kemiskinan menghambat kemampuan banyak orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar

mereka, seperti sandang, pangan, dan papan. Pada konteks ini, pemerintah Indonesia sangat menyadari perlunya membangun Sistem Perlindungan Sosial untuk menangkai penurunan daya beli masyarakat miskin dan aktif membantu mereka yang membutuhkan (Mardaus, 2021).

Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang tidak pernah selesai sepanjang kehidupan manusia. Realitas kemiskinan selalu menjadi isu faktual di setiap tempat dan zaman, bahkan tematik tentang kemiskinan sebenarnya merupakan wacana publik yang sudah cukup tua di perbincangkan oleh umat manusia. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan sebuah domain yang tidak sederhana, sehingga kita sering menemukan adanya perdebatan-perdebatan soal kemiskinan hampir di setiap diskusi publik. Seyogianya, kemiskinan sulit untuk dihapuskan, sebab kita hanya bisa mengambil bagian untuk meminimalisir meningkatnya angka kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan pada suatu negara, menggambarkan gagalnya agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan pada negara tersebut.

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah digelar, mulai dari pemberian beasiswa untuk siswa miskin, beras untuk keluarga miskin, bantuan langsung tunai, kredit usaha rakyat, serta program-program pemberdayaan lainnya yang cukup banyak berseliweran di masyarakat. Namun, pada kenyataannya kemiskinan masih juga menjadi sebuah topik pembahasan yang tidak ada habisnya. Sejak republik ini berdiri, kemiskinan masih menjadi masalah utama di bangsa ini.

Pada konteks ini, sesuai dengan ketentuan RPJMN 2015-2019, pemerintah sejauh ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan antara 7 sampai 8 persen dari RTSM. Pendampingan mitra program dengan pendidikan yang diterima dan dasar ilmiah yang tepat untuk mengubah sikap dan perilaku menjadikan PKH sebagai program dengan prioritas tinggi dalam memerangi kemiskinan. Di Indonesia, Program Keluarga Harapan telah secara signifikan meningkatkan kebiasaan belanja keluarga dan meningkatkan total konsumsi rumah tangga sebesar 4,8% di antara kelompok penerima manfaat (Kemensos, 2020).

Sejalan dengan uraian di atas, Mohammad Benny Alexandri (2020) menjelaskan bahwa Sejak tahun 2007, dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan. Sebagai program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan akses kepada keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak, akses ke berbagai fasilitas layanan kesehatan, fasilitas layanan pendidikan, dan program perlindungan. Program sosial lainnya yang melengkapi program yang ditawarkan secara berkesinambungan. Hal ini diperkuat oleh Restianti (2018), bahwa dalam upaya memberikan jaminan sosial bagi keluarga kurang mampu (KM), pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan PKH sejak tahun 2007. Anggota PKH berjumlah 3,5 juta tahun 2019, dengan tambahan 2,5 juta keluarga miskin ditargetkan pada tahun 2020, sehingga total menjadi 6 juta keluarga miskin

Inisiatif Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah yang berupaya memberikan bantuan keuangan bersyarat kepada keluarga berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan Kementerian Sosial (Kementerian Sosial RI, 2015). Pada konteks ini, dapat disimpulkan bahwa program PKH diperuntukkan bagi keluarga miskin, yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemensos. Hal yang harus diwaspadai oleh pemerintah desa dalam penyaluran bantuan program PKH adalah kesalahan data penerima, agar bantuan program PKH dapat disalurkan sesuai kriteria yang ditetapkan Kemensos, sebab kesalahan penginputan data penerima program PKH dapat berdampak pada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan seminimal mungkin dengan memaksimalkan upayanya, mengingat 10,86% penduduk Indonesia, atau 280,01 juta jiwa, per Maret 2016 (BPS, 2016). Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran pengentasan kemiskinan sebesar 7 hingga 8 persen pada tahun 2024. Program Keluarga Harapan (PKH) di perkirakan akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (rasio gini) dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Pengamatan lain menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak yang cukup besar terhadap pola konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah. Indonesia diyakini telah berhasil menerapkan *Conditional Cash Transfers* (CCT). Sebaliknya, Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia berhasil meningkatkan perilaku konsumsi rumah tangga penerima program sebesar 4,8% (Aras Solong dan Dzulfarnain, 2022).

Kemensos telah menetapkan kriteria keluarga penerima manfaat (KPM) dari bantuan PKH, seperti: 1)

keluarga tersebut hamil/nifas/ ibu menyusui; 2) dalam keluarga terdapat anak berusia kurang dari 7 tahun yang belum memasuki pendidikan dasar (usia pra sekolah); 3) dalam keluarga terdapat anak usia 6 sampai dengan 21 tahun (Kemensos RI, 2015).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah strategi melalui kebijakan untuk memenuhi kewajibannya mencapai kesejahteraan sosial bagi warga negaranya. Program Keluarga Harapan merupakan strategi yang dimaksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, daya tanggap, dan ketepatan dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dapat berjalan lancar dan memenuhi tujuan utamanya dengan menggunakan kriteria indikator tersebut dan mengkoordinasikan tindakan organisasi terkait dan rumah tangga penerima manfaat.

Pada beberapa studi yang dilakukan di beberapa daerah menjelaskan bahwa program PKH memiliki manfaat besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana studi Mustika Hasna dkk., (2019) yang dilakukan di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Ngawi, bahwa program PKH telah meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat. Selanjutnya studi Nurul Irtiah Fajriati dkk., (2020) yang dilakukan di Kecamatan Tungkal Ilir, diketahui bahwa pemberian bantuan PKH kepada keluarga penerima manfaat termasuk dalam kategori efektif, dimana rata-rata skor adalah 338,26 dari seluruh item pernyataan yang diberikan responden. Hal ini menunjukkan bahwa PKH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil studi ini tidak jauh berbeda dengan temuan Kahfi Septian Mawarni (2019) di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu – Ciamis, dimana hasil angket yang menghasilkan rata-rata skor sebesar 311, 59 berada pada kategori baik. Selanjutnya apabila dipersentasikan menghasilkan skor sebesar 75,10% yang berada pada kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa, implementasi program bantuan PKH di lokasi studi telah berjalan dengan baik.

Sejalan dengan uraian di atas, studi Lia Muliana dkk., (2021) yang dilakukan di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, diketahui bahwa dengan adanya bantuan PKH, keluarga penerima bantuan mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam keluarganya, dimana bantuan dana PKH bermanfaat dalam pemenuhan konsumsi dan kebutuhan keluarga sehari-hari. Kemudian studi Rahmi Ulva (2022) yang dilakukan di Kelurahan Piai Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang Sumatera Barat juga memperkuat beberapa studi yang diuraikan di atas, bahwa dampak bantuan PKH sudah sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya proses pendampingan yang sangat baik, evaluasi pelaksanaan PKH dilakukan dengan koordinasi semua pihak yang terlibat sehingga bisa melihat adanya kesejahteraan masyarakat.

Selain manfaat ekonomi dari bantuan PKH, program ini kerap menimbulkan persoalan di masyarakat akibat tidak tepat sasaran. Menurut sejumlah kajian, kriteria penerima bantuan PKH tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam penelitian Nikita Vidiana Senduk et al., (2021), terlihat bahwa PKH di Desa Bumi Beringin masih memiliki kendala, seperti penyaluran bantuan tunai dan sembako atau bantuan beras yang tidak tepat. Program Keluarga Harapan berdampak pada masyarakat yang melampaui populasi sasaran karena tidak semua orang berkesempatan mendapatkan PKH ini sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Studi di atas juga diperkuat dengan hasil penelitian Ijang Ruswandi, dkk., (2020), diketahui bahwa 1) Program Keluarga Harapan (PKH) belum maksimal dalam implementasinya, terutama dari aspek komunikasi. Sedangkan dari aspek sosialisasi kepada masyarakat, dinilai kurang lengkap, serta disposisi masih belum optimal. Hal ini disebabkan tidak optimalnya pendataan yang dilakukan oleh petugas dan pendamping PKH, sehingga data kemiskinan yang digunakan dalam menentukan penerima bantuan tidak akurat. Selanjutnya dari segi struktur birokrasi masih belum jelas karena pendamping PKH ditempatkan di kecamatan dan desa kelurahan tetapi berkoordinasi langsung dengan koordinator kecamatan dan pihak kecamatan hanya sebagai mitra dengan rekrutmen pegawai dari Kemensos; 2) Kendala Program Keluarga Harapan di Kabupaten Purabaya dalam hal implementasi kebijakan masih kurangnya sosialisasi oleh pendamping PKH, ketidaktepatan narasumber terlihat dari perspektif pendidikan terakhir pendamping yang kurang relevan dengan

pendampingan, ketidakjelasan disposisi atau hal-hal yang tidak jelas dalam hal pendataan kemiskinan yang harus dilaksanakan oleh BPS tetapi fasilitator PKH melaksanakan data kemiskinan, struktur birokrasi yang tidak jelas status pendamping PKH.

Pada konteks lain, studi Sandi Andika (2021) yang mengkaji PKH dari perspektif ekonomi Islam menyebutkan, bahwa dalam pandangan Islam, kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan dengan landasan tanggung jawab, berkeadilan, dan jaminan sosial atau *tafakul*. Pada realitas di lapangan, diketahui bahwa dari aspek nilai-nilai dasar ekonomi Islam dalam implementasi program PKH di Desa Mekar Delima belum memperlihatkan perlakuan yang adil terhadap hak masyarakatnya. Namun, jika dilihat dari aspek tanggungjawab dan juga jaminan sosialnya, sudah terlaksana dengan baik berdasarkan nilai dasar ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanggung jawab dari pendamping PKH dalam melaksanakan pendampingan program, dan juga adanya jaminan sosial dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diketahui bahwa kondisi dan kualitas hidup masyarakat mengalami penurunan, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat, terutama perekonomian. Selain itu, tingginya harga kebutuhan pokok dan kondisi keuangan yang menurun menghambat biaya pendidikan dan kesehatan merupakan masalah yang paling utama dirasakan oleh masyarakat di Desa Bangga. Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis dampak dari implementasi program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat Desa Bangga Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti melakukan analisis terhadap program PKH di Desa Bangga, terutama berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Adapun hal-hal yang dianalisis peneliti meliputi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang mencakup aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara holistik.

Rancangan penelitian kualitatif tidak dibatasi oleh aturan dan metode formal, tetapi lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan keadaan lapangan, sehingga kondisi ini membuat pengumpulan data memerlukan waktu yang lebih lama. Waktu diperlukan untuk penelitian kualitatif cukup lama karena landasan teoritis peneliti tidak lengkap dan tidak terbentuk pada awal penyelidikan; sebaliknya, teori tersebut didefinisikan menuju kesimpulan penelitian berdasarkan masukan informan (Creswel, 2014).

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan di lapangan adalah dengan cara melakukan observasi awal, setelah itu peneliti mencari informasi terkait penerima bantuan PKH dan kemudian menentukan 5 orang penerima sebagai informan untuk diwawancarai terkait dampak bantuan PKH bagi masyarakat. Agar informasi tidak terkesan sepihak, maka peneliti juga mewawancarai Kepala Desa dan Pendamping PKH. Hal ini peneliti lakukan untuk melakukan komparasi informasi yang diberikan oleh informan dari berbagai pihak agar informasinya tidak timpang.

Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan masyarakat dan pihak terkait yang paham dengan permasalahan penelitian, sehingga data yang diperoleh dari lapangan dapat dipercaya dan sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti mewawancarai 6 orang informan yang terdiri dari 3 orang masyarakat penerima program PKH, kemudian Kepala Desa Bangga, dan 1 orang Pendamping PKH. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan dokumen-dokumen kepustakaan, dan beberapa dokumen terkait penerima PKH yang peneliti kumpulkan langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bangga adalah salah satu desa yang ada di wilayah teritorial Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Secara geografis Desa Bangga memiliki luas wilayah 1,93 km². Berdasarkan letak geografis Desa Bangga dimana sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bubaa; Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan Teluk Tomini; Sebelah Timur berbatasan Teluk Bubaa dan Desa Lito; Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Limba (Profil Desa Bangga Tahun 2020).

Tabel 1. Kondisi Geografis Desa Bangga

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah: 1,93 km ² Jumlah Dusun: 3 Dusun	
2	Dusun Karang Ria Dusun Pangato Dusun Huidu	
3	Batas Wilayah Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Bubaa Sebelah Timur: Berbatasan dengan Teluk Bubaa dan Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Teluk Tomini Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Limbatihu	
4	Topografi Luas Kemiringan Lahan Datar: 1.300 Ha Ketinggian diatas Permukaan laut Rata-rata: M	
5	Hidrologi Irigasi Berpengairan Teknis	
6	Klimatologi Suhu : 320 C Curah Hujan : Tropis Kelembapan Udara : - Kecepatan Angin : -	
7	Luas Lahan Perkebunan : - Pertanian : 43,5 ha Pemukiman Kawasan Bencana : -	

Sumber: Profil Desa Bangga Tahun 2020

Berdasarkan pada (Tabel 1.) di atas, diketahui bahwa luas lahan pertanian Desa Bangga adalah 43,5 ha, dan menurut informasi yang dihimpun di lapangan, tidak terjadi perubahan pada luas lahan pertanian. Hal ini juga disebabkan karena sektor pertanian yang hanya merupakan pekerjaan sampingan masyarakat Desa bangga. Menurut informasi yang di lapangan, setiap kepala keluarga memiliki rata-rata 1,5 ha lahan yang digunakan untuk sektor pertanian. Di sisi lain, topografi wilayah Desa Bangga didominasi dengan bukit kapur yang menjorok ke laut Teluk Tomini, dengan permukiman yang terletak di pesisir tanjung Bangga. Bukit-bukit kapur ini terkesan gersang/kering karena tidak adanya sumber air, dan di dominasi oleh tumbuhan Lamtoro (petai cina). Di pesisir pantai masih didapati *mangrove*, meskipun sudah ada kerusakan disana-sini.

Pada konteks kondisi demografi, jumlah penduduk juga bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kualitas perkembangan pada produktivitas dan pembangunan sebuah desa. Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk menjadi sebuah ukuran atas keberhasilan pembangunan dalam suatu desa. Namun, laju pertumbuhan penduduk harus disesuaikan dengan daya tampung dari sebuah desa. Berdasarkan data BPS tahun 2022, penduduk Desa Bangga berjumlah 423 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 214 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 209 jiwa. Jumlah penduduk pada Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2020 yang berjumlah 401 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 209 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 192 jiwa.

Dampak PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Program Keluarga Harapan (PKH) mendukung tujuan penurunan angka kemiskinan di masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, harapan utama pemerintah pusat dari inisiatif program ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di pedesaan. Untuk

mencapai hal ini, melalui PKH pemerintah memberikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, masyarakat akan dimudahkan dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi terutama SD, SMP, dan SMA, serta masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan, terutama di daerah pedesaan dimana banyak anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga. Sebaliknya, jika sumber daya manusia desa tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka besar kemungkinan akan terjadi pengangguran disana. Kemiskinan pedesaan dan ketimpangan hanya akan meningkat sebagai akibatnya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjadi dasar bagi pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang di implementasikan melalui Program Keluarga Harapan (selanjutnya disebut PKH). Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan dan membantu keluarga berpenghasilan rendah dalam menerima akses ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar (Azhar et al., 2020; Hia et al., 2021; Andira et al., 2018; Mustari et al., n.d.). Program Keluarga Harapan merupakan inisiatif pemerintah dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan nontunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan memenuhi standar yang berlaku dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan keseluruhan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (Abd. Wahid dkk., 2021).

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa, jika dilihat dari besaran dana yang diberikan melalui bantuan PKH, sesungguhnya belum sepenuhnya mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga penerima manfaat, sebab kebutuhan masyarakat cukup bervariasi, sehingga dengan jumlah dana yang diterima hanya cukup untuk meringankan beban pengeluaran seperti pengeluaran untuk bahan pokok, pendidikan, dan kesehatan dari Keluarga Penerima Manfaat. Belum lagi masyarakat di perhadapkan dengan adanya kenaikan bahan-bahan pokok yang membuat masyarakat harus lebih cermat dalam mengatur keuangan. Masyarakat dituntut untuk membelanjakan bantuan PKH untuk hal-hal yang produktif, agar semua kebutuhan yang prioritas dapat terpenuhi termasuk kebutuhan primer rumah tangga. Bantuan PKH selain dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan ekonomi, dapat juga membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga.

Menurut TNP2K (2015), PKH berfokus pada dua komponen peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan standar sumber daya manusia, yang pada gilirannya meningkatkan standar kualitas sosial secara bersamaan dengan layanan pendidikan dan kesehatan. Bentuk bantuan ini juga tersedia melalui program bantuan lainnya, seperti Jamkesmas, Raskin, PSKS dan lainnya.

Hadirnya program Keluarga Harapan di banyak desa di Indonesia, setidaknya mampu meminimalisir kesenjangan, serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa, khususnya di Desa Bangga. Penyaluran program PKH harus tepat sasaran, agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya, terutama dalam hal mengurangi beban kebutuhan keluarga sehari-hari yang harus dipenuhi. Ini adalah aspek yang paling penting dari implementasinya. Keluarga Penerima Manfaat (selanjutnya disingkat KPM) telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan penyaluran bantuan juga berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sesuai dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa penyaluran program bantuan PKH di Desa Bangga tepat sasaran. Tidak ada potongan untuk biaya lain-lain pada saat penyaluran. KPM menerima bantuan sesuai dengan jumlah dana yang telah ditentukan.

Merujuk pada hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa implementasi PKH di Desa Bangga sudah tepat sasaran. Selain itu KPM bantuan PKH sudah merasakan manfaat dari program tersebut, dimana program PKH cukup membantu meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan keluarga terutama dalam hal menunjang pendidikan anak. Selain itu, menurut informasi di lapangan, bahwa

untuk pengurusan administrasi pada saat mendaftar sebagai calon penerima PKH sangat mudah, hanya perlu memasukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

“Syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendaftar PKH kalau dari kami dilihat dari pendapatan masyarakat, tempat tinggal, belum mempunyai pekerjaan dan lain-lain. Itu kalo dari desa mendata KK miskin, itu dimasukan di data DTKS lalu diinput ke pusat dan itu akan keluar nama nama di PKH, ini kebanyakan ada data miskin dan banyak namanya tidak keluar di DTKS” (Wawancara dengan Kepala Desa Bangga AP tanggal 7 April 2022, pukul 15.00).

Hasil wawancara Kepala Desa Bangga diperkuat oleh temuan lapangan, dimana menurut beberapa KPM, bahwa bantuan dana PKH telah dirasakan manfaatnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Salah satu contoh KPM-PKH, dimana ia menerima bantuan PKH setiap 3 bulan sekali, dimana besaran bantuannya sekitar Rp. 750.000. Sebenarnya untuk besaran bantuan berdasarkan jumlah anak dan pendidikan anak, khusus untuk Ibu Herlina sendiri yang memiliki dua anak, dimana yang satunya masih bersekolah di SD dan satunya lagi kuliah. Semua kebutuhan sekolah anak Ibu Herlina cukup terpenuhi dengan adanya bantuan PKH, mulai dari kebutuhan pakaian sekolah, pakaian sehari-hari, sepatu, uang jajan dan bahkan uang transportasi ke sekolah. Selain bantuan berupa uang, seringkali juga Ibu Herlina diberikan bantuan beras sebanyak 20 Kg dan telur.

“Sudah 5 tahun saya terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini, saya bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Saya menerima PKH pertiga bulan, kurang lebih 750 ribu. Saya memiliki 2 orang anak, yang satu masih SD dan yang satunya lagi kuliah. Semua kebutuhan anak saya dalam mengenyam pendidikan dapat dipenuhi dan Alhamdulillah saat ini anak saya sudah menempuh perkuliahan. Sebagian bantuan dana dari PKH saya belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga saya dan sebagian lagi saya gunakan untuk membeli pakaian sekolah, sepatu dan untuk uang jajan dan transportasi. (Wawancara dengan KPM tanggal 8 April 2022, pukul 10.00).

Perihal jumlah bantuan PKH, setiap keluarga penerima PKH khususnya di Desa Bangga mendapatkan bantuan dengan besaran jumlah bantuan yang berbeda-beda, minimum Rp. 500.000,- dan maksimum Rp. 1.200.000,-. Ada beberapa kategori bantuan yang diterima masyarakat, diantaranya, jika dalam keluarga tersebut memiliki anak yang masih sekolah, maka besaran dana yang diberikan berdasarkan tingkat pendidikan anak, misalnya anak yang sekolah SD itu mendapatkan dana Rp.225.000, SMP Rp.375.000, SMA Rp.500.000. Sedangkan untuk kategori untuk kesejahteraan sosial ada dua komponen yakni disabilitas dan lansia dimana besaran bantuannya berjumlah Rp.600.000 / 3 bulan. Kategori berikutnya adalah ibu hamil dan anak usia dini dimana besaran dana yang diterima yakni berjumlah Rp.150.000/3 bulan.

Bantuan PKH untuk keluarga miskin telah membawa transformasi, terutama dalam hal kesejahteraan sosial masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat berangsur-angsur membaik. Sebab, dengan bantuan PKH, keluarga terbebas dari beban keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya yang cukup besar. Pengaruh dukungan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bangga lebih lanjut ditunjukkan dengan adanya beberapa individu yang menarik diri dari bantuan PKH karena merasa kebutuhannya telah terpenuhi, padahal masih ada yang sangat membutuhkan PKH. pendampingan.

Dampak positif dari adanya bantuan dana PKH di Desa Bangga sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Bangga, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, dengan bantuan PKH bagi masyarakat miskin, juga berdampak pada adanya peningkatan taraf pendidikan anak dimana keluarga penerima manfaat sangat terbantu dalam menyekolahkan anaknya, sebab semua kebutuhan biaya dari transportasi, biaya pakaian dan biaya lainnya sudah terpenuhi, sehingga keluarga yang menerima bantuan PKH tidak lagi terkendala dengan kebutuhan biaya yang diperlukan dalam dunia pendidikan.

Sejalan dengan uraian di atas, merujuk hasil temuan lapangan, bahwa sudah banyak anak-anak sekolah yang menerima bantuan PKH telah menyelesaikan pendidikan 12 tahun sebagaimana yang diharapkan

pemerintah pusat terkait pemberian bantuan PKH. Belum lagi pada saat goncangan ekonomi yang dirasakan masyarakat pada saat pandemik Covid-19 melanda seluruh desa di Propinsi Gorontalo, bantuan PKH sangat bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Bangga pada saat pandemik berlangsung, dimana ekonomi masyarakat pada saat itu sangat porak-poranda, ditambah lagi dengan adanya pembatasan sosial yang berdampak pada sektor ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.

Selain manfaatnya dirasakan oleh KPM, proses pengurusan administrasinya pun sangat mudah. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa kemudahan dalam pengurusan administrasi sebagaimana disebutkan di atas, juga karena adanya data yang dihimpun pemerintah Desa Bangga melalui pendataan KK miskin yang kemudian dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) KEMENSOS yang kemudian menjadi acuan pemerintah dalam menentukan siapa saja masyarakat yang bisa menjadi penerima bantuan sosial salah satunya PKH. Pada konteks ini, peran pemerintah Desa Bangga juga cukup besar dalam memastikan dan mengevaluasi siapa saja masyarakat miskin yang berhak untuk dimasukkan ke dalam DTKS yang kemudian diinput oleh aparat Desa Bangga ke pusat. Seringkali juga persoalan data ini menimbulkan masalah di beberapa desa di Indonesia, dimana ada masyarakat yang seharusnya layak untuk mendapatkan bantuan, namun karena persoalan kesalahan data menyebabkan masyarakat tersebut tidak keluar namanya sebagai penerima PKH.

Syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendaftar menjadi penerima PKH dilihat dari pendapatan keluarga, tempat tinggal, status pekerjaan dan lain-lain. Pihak pemerintah desa akan melakukan pendataan KK miskin, kemudian dimasukkan ke dalam DTKS, lalu di input ke pusat, setelah itu keluar nama-nama penerima bantuan PKH berdasarkan data yang di input pemerintah desa. Seringkali juga ada data KK miskin yang namanya tidak keluar. Selain kemudahan dalam pengurusan administrasi, proses pendampingan oleh pendamping PKH juga merupakan penunjang dalam keberhasilan implementasi PKH kepada masyarakat miskin di pedesaan.

“Syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendaftar PKH kalau dari kami dilihat dari pendapatan masyarakat, tempat tinggal, belum mempunyai pekerjaan dan lain-lain. Itu kalo dari desa mendata KK miskin, itu dimasukkan di data DTKS lalu di input ke pusat dan itu akan keluar nama nama di PKH, ini kebanyakan ada data miskin dan banyak namanya tidak keluar di DTKS (Wawancara dengan Pendamping PKH tanggal 7 April 2022, pukul 09.00).

Pada konteks ini, peran fasilitator tidak bisa dipungkiri. Merekalah yang berada di garis depan untuk membantu dan mengawal program. Hasil program menunjukkan bahwa masyarakat miskin dapat menikmati hidup sejahtera karena terpenuhinya kebutuhan pokok, serta menabung dan membuka usaha. Isi program yang dilengkapi dengan pertemuan rutin terstruktur untuk menambah pengetahuan keluarga secara dinamis dapat mendorong etos positif (Ahmad Amir Aziz, 2021).

Pada konteks implementasi, agar proses pemberian berjalan dengan baik dan tepat sasaran, pelaksanaan PKH di Desa Bangga di dampingi oleh dua orang pendamping yang disebut sebagai Pendamping PKH. Pendamping PKH diseleksi langsung oleh pemerintah daerah yakni melalui Dinas Sosial. Pendamping PKH memiliki fungsi pendampingan dengan cara memfasilitasi, memediasi dan melakukan advokasi terhadap KPM, memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan KPM PKH dampungannya dalam format Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan melakukan fungsi penanganan pengaduan. Dalam penggunaan dana bantuan PKH, keluarga penerima manfaat mendapatkan edukasi dari pendamping PKH terkait penggunaan dana agar tidak disalah gunakan masyarakat. Proses pendampingan ini menjadi penting untuk meminimalisir terjadinya penyalah gunaan dana untuk keperluan keluarga yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pendamping PKH melakukan sosialisasi atau kegiatan pendampingan satu kali sebulan setiap minggu pertama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan kesimpulan, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan taraf hidup masyarakat, tingkat pendidikan dan

pelayanan kesehatan di Desa Bangga masyarakat yang cukup baik. Khususnya untuk pelayanan pendidikan, dimana masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan, sebab masalah pembiayaan pendidikan anak yang menjadi beban masyarakat saat ini, dapat teratasi dengan adanya dana bantuan dari Program Keluarga Harapan. Disamping itu, Program Keluarga Harapan juga menjadi alternatif dalam memutus mata rantai kemiskinan, dimana salah satu mata rantai kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah dan hal ini sudah teratasi dengan dana bantuan melalui Program Keluarga Harapan. Merujuk data yang dihimpun dari Desa Bangga, diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Bangga cukup baik dibuktikan dengan berkurangnya anak putus sekolah, serta jumlah masyarakat yang berpendidikan Sarjana meningkat setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, L. F., Badriah, L. S., & Bambang, B. (2020). Family Hope Program Evaluation in Poverty Alleviation: Benefit Incidence Analysis. *Economics Development Analysis Journal*, 9(1), 97-110. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i1.38471>
- Andika, S. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)." *Bertuah*, 2(1), 44-55.
- Andira, A., Burhanudin, & Kalalinggi, R. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Samarinda. *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat NasionaleJournal Ilmu Pemerintahan* , 6(4).
- Aziz, A.A., Royani, Syukriati. (2021). The Implementation of Family Hope Program in Social Protection and Welfare in West Lombok. *Journal of the Community Development in Asia (JCDA)*, 4(3), 1-11. <https://doi.org/10.32535/jcda.v4i3.1176>
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2016). Statistik Indonesia Tahun 2016. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edisi)*. SAGE Publication Inc.
- Fajriati, N.I., Isnaeni, N., Ridhwan. (2020). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kecamatan Tungkal Ilir). *Journal of islamic Economic and Finance*,1(1), 43-50.
- Handayaningsih, S., Purwadi, H., Isharyanto. (2021). Implementation of The Family Hope Program as an Effort to Overcome Poverty in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 8(1), 55-60. <https://doi.org/10.14445/23942703/IJHSS-V8I1P108>
- Hasna, N.M., Nugraha, N., Mustikarini, I.D. (2019). Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 108-116. <http://doi.org/10.25273/citizenship.v7i2.5917>
- Hia, E. N., Siagian, M., & Achmad, N. (2021). Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan. *PERSPEKTIF*, 10(1), 128-139. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4146>
- Kemensos RI. 2015. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Jakarta.
- Mawarni, K.S. (2019). Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Oleh Pendamping PKH di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6 (3), 10-11. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i3.2807>
- Mohammad Benny Alexandri. Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019. *Jurnal MODERAT*, 6(2), 237-244.
- Muliana, L., Mursyidin, Siregar, M. (2021). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 92-96. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.3417>

- Mardaus, Khaidir, A. (2021) The Influence of the Family Hope Program (PKH) Policy on Community Welfare in Kubung District, Solok Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, 11(1), 149-160. <https://doi.org/10.26858/jiap.v11i1.20521>
- Mustari, N., Hakim, L., Erni, E., & Puspaningrum, M. (2019). Policy Influence of Family Hope Program to Reduce the Poverty in Takalar, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 152-161. <https://doi.org/10.26618/ojip.v9i2.2449>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Profil Desa Bangga Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo Tahun 2020.
- Program Keluarga Harapan. (2020). Kementerian Sosial: <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>. Diakses 6 Desember 2022 (18:00).
- Restianti, A. (2018). Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(2), 405-426. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-10>
- Ruswandi, I., Sunarya, E., Suwiryo, H. (2020). Implementation of the "Hope Family Program" Policy at Purabaya District, Sukabumi, West Java. *International Journal of Multi Science*, 1(5), 14-28.
- Senduk, N.V., Kiyai, B., Plangiten, N. (2021). Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik JAP* 101(7), 40-47.
- Solong, A., Dzulfarnain. (2022). The Effectiveness of the Implementation of the Hope Family Program in Poverty Reduction in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(7), <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.382>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2015). Program Keluarga Harapan (Upaya Memutus Rantai Kemiskinan Antar Generasi): <https://www.tnp2k.go.id>. Diakses 7 Desember 2022 (15:00).
- Ulva, R. (2022). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Piai Tengah. *Journal of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 2(2), 178-182. <https://doi.org/10.24036/pgde.v2i2.124>
- Wahid, A., Nawawi, J., Nurlina. (2021). The Effectiveness of the Implementation of the Family Hope Program in North Sinjai District. *Jurnal Office: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 7(1), 125-134. <https://doi.org/10.26858/jo.v7i1.22889>